

Dinamika Islam dan Politik Elit - Elit Muhammadiyah Periode 1998-2010

Ridho Al-Hamdi

Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. E-mail: ridho@umy.ac.id

Abstract

This research studied on political elite in Muhammadiyah as moderate representatives in post-New Order in response of the dynamics Islam and politics. There are three issues as basic analyzes, i.e. the emergence of Islamic political parties, the desire of returning the Jakarta Charter as the state principle as well as phenomenon of terrorism which is always attached a term of "jihad" in Islamic tradition. Meanwhile, to conduct data and information, the research uses a qualitative approach as methodology as well as documentation and interviews as a technique of collecting data. The collected data then is analyzed and interpreted descriptively to get a proper conclusion. The result of the research shows that there are four variants in political elite in Muhammadiyah, i.e. transformative-idealistic, moderate-idealistic, realistic-critical, and accommodative-pragmatic. The variations are deeply influenced by two factors, i.e. sociological elite background and organizational.

Keywords: Political attitudes, Muhammadiyah's elite, Islam and politics

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang politik elit Muhammadiyah sebagai representasi kaum modernis dalam merespon dinamika Islam dan politik pasca Orde Baru. Ada tiga isu yang dijadikan sebagai basis analisis, yaitu munculnya partai-partai Islam, keinginan untuk pengembalian Piagam Jakarta sebagai azas negara, dan munculnya fenomena terorisme yang selalu dilekatkan sebagai jihad. Dalam menggali data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ada empat varian perilaku kaum modernis, yaitu sikap transformatif-idealistik, sikap moderat-idealistik, sikap realistik-kritis, dan sikap akomodatif-pragmatis. Keempat varian tersebut sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor latar belakang sosiologis masing-masing elite dan faktor pemahaman masing-masing elite terhadap organisasi Muhammadiyah.

Kata kunci: Sikap politik, elite Muhammadiyah, Islam dan politik

PENDAHULUAN

Runtuhnya rezim Orde Baru ditandai dengan lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 dari tahta kekuasaannya menjadi sejarah baru bagi perkembangan perpolitikan di Indonesia. Momentum tersebut telah menjadi tanda, bahwa rezim otoriter telah berakhir. Sejak Orde

Baru tumbang, perubahan iklim politik di Indonesia berjalan secara cepat dibandingkan dengan era sebelumnya. Kemudian tahta kekuasaan diserahkan kepada BJ Habibie. Menurut Sahdan (2004: 87-92), ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya masa transisi ini. *Pertama*, terjadinya krisis basis material (ekonomi) yang dipicu oleh krisis ekonomi regional. *Kedua*, terjadinya krisis legitimasi kekuasaan Soeharto. *Ketiga*, kuatnya desakan dari *civil society* (para demonstran) yang berkehendak untuk menjatuhkan kekuasaan Soeharto. *Keempat*, keretakan di kalangan elite Soeharto, seperti adanya pengkhianatan beberapa elite, jatuhnya pamor militer, birokrat, Golkar, dan para teknokrat akibat dianggap sebagai penjilat kekuasaan, serta munculnya tokoh-tokoh oportunistis yang berlaihi mencaci maki Soeharto. Masa transisi ini pula yang menurut Amir (2003: 278), menyebabkan peta politik nasional diselimuti oleh euforia politik yang terbelah secara tajam menjadi kekuatan politik kaum reformis *versus* kekuatan politik *status quo*. Golkar dinobatkan oleh kaum reformis sebagai penjelmaan *status quo*.

Hal ini kemudian berimplikasi luas terhadap perkembangan politik di Indonesia. Aura politik yang dirasakan bagaikan angin segar yang dapat dinikmati oleh siapapun tanpa ada tekanan dari rezim yang berkuasa. Fragmentasi politik di kalangan aktivis gerakan Islam kian beragam. Diskursus seputar Islam dan politik muncul kembali ke permukaan, ditandai dengan lahirnya beragam partai politik Islam, perdebatan tentang dasar negara, serta munculnya fenomena terorisme selalu dilekatkan dengan kosa kata "jihad" dalam tradisi Islam. Di kalangan para aktivis Islam pun belum menemukan titik temu tentang perdebatan itu.

Jika kita menengok kembali sejarah, dinamika antara Islam dan politik telah dimulai sejak menjelang kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat terlihat ketika perdebatan tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Perdebatan di antara para anggota sidang memunculkan dua gagasan utama tentang dasar negara sebagaimana dikemukakan oleh Anshari (1997: 27-28). Kelompok nasionalis Islam menginginkan agar Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Sedangkan kelompok nasionalis sekuler menginginkan Indonesia sebagai negara persatuan nasional yang memisahkan antara urusan negara dan Islam, dengan kata lain: bukan negara Islam. Menurut Anshari (1997: 34), selain kelompok nasionalis Islam, seperti Kahar Muzakkir,

Abikoeso Tjokrosoejoso, Agus Salim, Ahmad Soebarjo, dan Wachid Hasyim yang tergabung dalam "Panitia Sembilan" sebagai penggagas Piagam Jakarta, anggota sidang BPUPKI lainnya yang juga mendukung Piagam Jakarta adalah Ki Bagus Hadikusumo, saat itu menjabat ketua PP Muhammadiyah.

Kemudian, lanjut Anshari (1997: 46), sehari setelah kemerdekaan, 18 Agustus 1945, anggota PPKI yang terdiri dari 21 orang mengadakan sidang untuk menetapkan UUD beserta mukadimah dan persoalan lain yang diusulkan oleh para anggota sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dalam sidang itu, menurut Thaba (1996: 47), Mohammad Hatta menyampaikan beberapa usulan perubahan, di antaranya perubahan pada preambuli Piagam Jakarta, yaitu anak kalimat: "Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pada awalnya, sebagian anggota sidang PPKI menolak gagasan Bung Hatta (sapaan akrab Mohammad Hatta), seperti Ki Bagus Hadikusumo. Namun, setelah Bung Hatta, Teuku Muhammad Hasan, Wachid Hasyim, dan Kasman Singodimejo meyakinkan Ki Bagus dengan berbagai alasan agar jangan sampai pecah dengan non-muslim demi kemerdekaan Indonesia, akhirnya Ki Bagus menyetujui perubahan tersebut. Akhirnya, syariat Islam sebagai ideologi negara mengalami kegagalan.

Sepuluh tahun kemudian, setelah Pemilu 1955, menurut Maarif (*Prisma* No. Ekstra, 1984 Th. XIII: 74-75), perdebatan tentang Islam dan Pancasila kembali dibicarakan pada pelataran konstitusional. Pemilu pertama ini bertugas membentuk parlemen dan Majelis Konstituant. Semula Majelis Konstituante diharapkan mampu membuat UUD yang permanen untuk menggantikan UUDS yang pernah dimiliki. Namun, usaha itu belum dapat terselesaikan sekalipun sudah mencapai 90% hingga sidang terakhirnya, 2 Juni 1959. Situasi yang setengah macet ini diatasi oleh Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juni 1959 dengan membubarkan Majelis Konstituante dan menetapkan kembali berlakunya UUD '45 sebagai dasar ideologi negara, dengan tetap mempertimbangkan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang menjiwai UUD '45 dan merupakan satu rangkaian dengan UUD tersebut. Ini artinya, perjuangan syariat Islam kembali menemukan kegagalan untuk yang kedua kalinya.

Dalam persoalan partai, komunitas Islam pasca kemerdekaan menyepakati didirikannya suatu partai Islam. Keinginan ini, menurut Jurdi (2010: 116-117), diperkuat dengan ada himbauan pemerintah pada 3 Oktober 1945 yang mengajak rakyat untuk mendirikan partai. Himbauan serupa diulang kembali pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Bung Hatta. Atas himbauan itu, umat Islam mengadakan Kongres Umat Islam Indonesia pada 7-8 November 1945 di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dari kongres ini disepakati lahirnya Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia.

Gagasan ini disambut baik oleh seluruh ormas Islam, termasuk Muhammadiyah yang kemudian menjadi salah satu anggota istimewa Masyumi. Bentuk penyambutan yang sangat antusias itu dibuktikan dengan keterlibatan secara langsung kader-kader Muhammadiyah yang duduk di jajaran kepengurusan Masyumi, seperti Fakih Usman, Ki Bagus Hadikusumo, Sutan Mansur, Hamka, Ahmad Badawi, Djindar Tamimy, dan elite-elite Muhammadiyah lainnya. Selain di Masyumi, elite Muhammadiyah lainnya ada yang mendirikan partai Islam, seperti Mas Mansur mendirikan Partai Islam Indonesia (Noor, 1987: 102, 103, 111 dan PP Muhammadiyah, 2010: 27, 33, 36, 47).

Seiring berjalannya dinamika politik bangsa, perjuangan politik Islam tidak selamanya bernasib baik. Pada akhir 1959 Masyumi dibubarkan oleh Soekarno karena tuduhan terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Setelah itu, politik Islam sempat vakum, sekalipun tokoh-tokohnya selalu mengadakan pertemuan untuk membahas tentang politik Islam. Ketika keluarga besar Bulan Bintang ingin merehabilitasi Masyumi, gagasan tersebut ditolak oleh Soeharto sebagai penguasa pengganti Soekarno.

Sebagai jalan tengah, menurut Ramly dan Sucipto (2010: 237), lahirlah Parmusi dengan ketua umumnya Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai sekretaris umum. Kedua tokoh puncak Parmusi ini merupakan kader-kader Muhammadiyah. Namun, nasib Parmusi sama seperti Masyumi, bahkan umurnya lebih pendek. Rezim Orde Baru menginginkan penyederhanaan partai, sehingga partai-partai Islam, seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti mengalami fusi menjadi PPP yang lahir 5 Januari 1973 (Djojosoekarto dan Sandjaja, 2008: 24).

Keberadaan PPP dalam prakteknya tidak selalu merepresentasikan politik Islam sekalipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pada setiap Pemilu sejak tahun 1977 hingga tahun 1997, perolehan suara PPP tidak pernah di atas 30% dan selalu berada pada urutan kedua di bawah Golkar dan di atas PDI (Djojosoekarto dan Sandjaja, 2008: 25-29).¹ Di bawah rezim Orde Baru, perbincangan tentang Islam dibungkam, terutama setelah pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Berdasarkan ketetapan MPR RI No. 11/1983 yang secara operasional dituangkan dalam UU No. 3 dan No. 8 Tahun 1985 tentang pemberlakuan asas tunggal Pancasila, maka seluruh Ormas maupun Orpol harus menjadikan Pancasila sebagai asas gerakan atau partainya (*Satu Abad Muhammadiyah*, 2010: 278).

Setelah rezim Orde Baru lengser, dinamika tentang Islam dan politik kembali mencuat ke ranah publik yang ditandai setidaknya oleh tiga momentum. *Pertama*, banyaknya partai Islam yang bermunculan setiap menjelang Pemilu. Pada Pemilu 1999 ada 20 partai Islam yang menjadi peserta, pada Pemilu 2004 ada enam partai Islam, dan pada Pemilu 2009 ada empat partai Islam. *Kedua*, terjadinya perdebatan tentang dasar negara saat Sidang Tahunan MPR yang membahas amandemen UUD '45. Sebagaimana fraksi dalam DPR RI memperjuangkan kembali Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Momentum yang demikian didukung oleh sejumlah aksi yang terjadi di beberapa daerah. *Ketiga*, munculnya fenomena terorisme sejak peristiwa hancurnya gedung WTC (11 September 2001) sebagai lambang keperkasaan negara Amerika. Akibatnya, sejumlah aksi terorisme domestik terjadi di tanah air. Setidaknya tiga momentum tersebut yang akan diajukan sebagai fokus isu dalam penelitian ini.

Sebagai kelompok yang berkepentingan, elite-elite Islam dari berbagai aliran, termasuk elite Muhammadiyah di dalamnya, berupaya untuk berperan dalam merespon dinamika tersebut. Sebagai gerakan Islam modern, sikap elite Muhammadiyah tidaklah bersifat tunggal, melainkan plural. Perbedaan sikap pun, menurut Mashad (*Jurnal Politika*, Volume 2 No. 2: 125-126) tidak lagi berpola klasik antar sub-kultur tradisional *versus* modernis, tetapi lebih kompleks akibat sub-kultur itu sendiri mengalami perpecahan antara kelompok substansialis *versus* kelompok formalis.

¹ Pada Pemilu 1977 PPP memperoleh suara 22,29%. Pada Pemilu 1982 memperoleh suara 27,78%. Pada Pemilu 1987 memperoleh 15,97%. Pada Pemilu 1992 memperoleh 17,01%. Pada Pemilu 1997 memperoleh 22,43%.

Ada dua alasan mengapa tema ini signifikan untuk dikaji. *Pertama*, berbicara tentang sikap politik di kalangan masyarakat umum atau partai politik mungkin sudah menjadi hal biasa dan juga telah banyak peneliti yang mengkaji tentang hal ini. Sedangkan penelitian yang mengkaji tentang sikap politik dalam konteks *civil society* (Muhammadiyah) sejauh ini belum terlalu banyak. Pada kenyataannya, sikap politik elite Muhammadiyah tidaklah tunggal, melainkan plural. Gerakan Muhammadiyah yang bercorak modern, dinamis, dan progresif tidak selamanya berlaku normatif, bahwa aktivisnya pasti rasional. Faktor kepemimpinan yang bersifat kolektif-kolegial dan tidak adanya satu komando juga mempengaruhi variasi sikap politik elite Muhammadiyah. Kebijakan-kebijakan yang telah menjadi keputusan pun terkadang tidak begitu berpengaruh, seperti kasus kelahiran PAN maupun PMB yang tetap memunculkan perdebatan publik mengenai hubungannya dengan Muhammadiyah. Begitu juga sikap-sikap elite Muhammadiyah terhadap Piagam Jakarta dan terorisme yang terlihat variatif.

Kedua, penelitian ini memperkaya kajian tentang politik yang terjadi di negara berkembang, negara yang sedang menata diri menuju demokrasi yang dewasa, sehingga terwujud cita-cita luhur, yakni kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya, pengaruh politik elite mengalami keruntuhan disebabkan oleh hilangnya politik aliran dan pudarnya kepemimpinan kharismatik yang melekat pada elite Muhammadiyah. Atau *power sharing* yang terjadi pada Muhammadiyah tidak terpusat melainkan tersebar merata sehingga menyebabkan sikap politik elitnya yang variatif. Karena itu, studi ini ingin menggambarkan apakah politik aliran (dalam hal ini agama) masih berlaku di Muhammadiyah atau sudah hilang, serta sejauh mana spektrum fragmentasi sikap politik para elitnya akibat model kepemimpinan yang kolektif-kolegial.

Studi yang dilakukan dalam penelitian ini dibatasi waktu antara 1998-2010. Tahun 1998 merupakan momentum bersejarah dimana terjadi peralihan kekuasaan dari era Orde Baru ke era Reformasi. Sejak tahun ini, peta perpolitikan Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar. Sedangkan tahun 2010 merupakan tahun terakhir periode kepemimpinan Muhammadiyah yang terjadi setiap lima tahun sekali. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan rumusan masalah: *Bagaimana sikap politik elite Muhammadiyah*

periode 1998-2010 dalam merespon relasi antara Islam dan politik? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya?

KERANGKA TEORITIK

Pembahasan kerangka teoritik mencakup empat hal, yaitu (1) Islam dan politik, (2) teori elite dan studi elite di Indonesia, (3) konsep elite dalam Islam, dan (4) sikap politik elite Islam.

1. Islam dan Politik

Islam tidak memisahkan antara urusan agama dan politik. Justru, Islam memandang politik sebagai bagian dari jalur dakwah yang harus dimanfaatkan oleh umat Islam. Jika kita menegok sejarah, praktek politik di kalangan umat Muslim telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW, terutama saat lahirnya Piagam Madinah dan juga masa setelah itu, yaitu masa Khulafaurrasyidin di awal-awal tahun hijriyah (Thaba, 1996: 83-111). Dinamika Islam dan politik di Indonesia telah dimulai sejak pra kemerdekaan, tetapi pasca kemerdekaan dimulai saat terjadi perdebatan tentang dasar negara. Di satu sisi, kelompok nasionalis Islam memandang, bahwa Islam harus menjadi dasar negara yang kemudian tertuang dalam Piagam Jakarta. Di sisi lain, kelompok nasionalis sekuler memandang bahwa, Islam harus dipisahkan dari urusan kenegaraan alias menolak Islam menjadi dasar negara. Kemudian muncul gagasan Pancasila yang kemudian resmi menjadi dasar negara. Setelah mengalami kegagalan, perdebatan tentang dasar negara muncul kembali setelah Pemilu 1955 dengan dibentuknya Majelis Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang permanen. Namun, Majelis Konstituante menemui jalan buntu hingga tahun 1959 dan dipandang oleh Soekarno tidak dapat bekerja dengan baik. Akhirnya, dengan dekrit presiden, Majelis Konstituante dibubarkan dan UUD '45 kembali diberlakukan sebagai UUD permanen. Lagi-lagi gagasan negara Islam mengalami kegagalan.

Perjuangan politik melalui partai juga menjadi menarik untuk dikaji, melihat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Setelah gagasan negara Islam gagal, umat Islam sepakat mendirikan Masyumi. Namun, perpecahan terjadi di tubuh Masyumi. NU memisahkan diri menjadi Partai NU dan Sarekat Islam mendirikan PSII. Perjuangan politik Masyumi pun tidak selalu bernasib baik. Di penghujung tahun 1959 bersamaan

dengan dibubarkannya Majelis Konstituante, Masyumi pun dibubarkan oleh Soekarno karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Proses rehabilitasi selalu diusahakan oleh kalangan elite Masyumi, tetapi selalu gagal. Begitu juga, ketika rehabilitasi dilakukan di era Soeharto tetapi kembali ditolak. Sebagai jalan tengah, lahirlah partai baru bernama Parmusi. Namun, nasib tidak baik juga menimpa Parmusi yang harus mengalami fusi partai menjadi PPP. Dari tahun ke tahun, partai Islam selalu mengalami penurunan suara.

Selain itu, fenomena terorisme yang selalu dikaitkan dengan jihad dalam tradisi Islam tak kalah menarik untuk ditelaah. Kajian tentang terorisme menjadi makin semarak terutama setelah peristiwa 9/11 yang meledakkan dua menara kembar milik negara adikuasa, AS. Pasca peledakan tersebut, sejumlah aksi terorisme mewarnai di berbagai daerah di tanah air. Fakta menyebutkan, aktor di balik setiap kejadian tersebut adalah aktivis dari kelompok Islam. Ada apa sebenarnya? Di sinilah pada akhirnya, terorisme tidak sekadar menjadi fenomena kejahatan semata, melainkan dapat menjadi alat politik untuk berbagai kepentingan, misal untuk mengalihkan isu, melemahkan pemerintah, dan lain sebagainya. "Islam" menjadi begitu seksi untuk ditarik pada wilayah politik.

2. Teori Elit dan Studi Elit di Indonesia

Pembahasan tentang elite dalam kerangka teoritik ini merujuk pada makna yang telah dikonsepsikan oleh Putnam, Pareto, dan Mosca. Menurut Putnam (2001: 80), elite merupakan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Fokus kajiannya adalah kekuasaan, yang terbagi ke dalam dua konsepsi. *Pertama*, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain. *Kedua*, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif, seperti undang-undang. Karena itu, Putnam membagi elite ke dalam dua kelompok, yakni mereka yang memiliki kekuasaan politik "penting", dan mereka yang tidak memilikinya. Sedangkan berdasarkan konsepsi Mosca dan Putnam, elite dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok sebagaimana yang dikemukakan oleh Pareto dan dikutip ulang oleh Bottomore (2006: 2). *Pertama*, elite yang memerintah (*governing elite*), terdiri dari individu-

individu yang secara langsung atau tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. *Kedua*, elite yang tak memerintah (*non-governing elite*) yang mencakup sisanya.

Dari sini dapat dipahami, bahwa konsep elite setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut. *Pertama*, elite merupakan kelompok pilihan yang jumlahnya minoritas. *Kedua*, elite memiliki kekuasaan politik penuh. *Ketiga*, dapat mempengaruhi dan menentukan arah perubahan sosial dalam lingkup kekuasaannya. *Keempat*, elite adalah kelompok yang terorganisir dan terstruktur. *Kelima*, elite dapat melakukan perintah terhadap orang selain mereka atau massa yang tak terorganisir. Dalam konteks Indonesia, Kartodirjo (1981: vii) memberi pemahaman tentang elite sebagai golongan sosial terkemuka yang memiliki kekuasaan dan memainkan peranan penting dalam menentukan arah gerak perubahan sosial di Indonesia. lebih lanjut, Baswedan (2006) memetakan elite politik Indonesia berdasarkan kurun waktu tertentu. Berikut digambarkan dalam tabel.

Tabel 1. Formasi dan Sirkulasi *Rulling Elite* Indonesia Versi Anies Baswedan

FASE PEMBENTUKAN ELITE		FASE MATURITAS ELITE	
Periode	Tren/ Jalur Rekrutmen	Periode Maturitas	Rulling Elite
1990-an – 1930-an	Pendidikan Modern	1940-an – 1960-an	Intelektual
1940-an – 1960-an	Perjuangan Fisik	1970-an – 1990-an	Angkatan Bersenjata
1960-an – 1990-an	Organisasi Massa/ Politik	2000-an – 2020-an	Aktivis
1990-an – Sekarang	Pasar/Dunia Bisnis	2020-an – ?	Entrepreneur / Bisnismen

Sumber: Tabel ini dikembangkan oleh Alfan Alfian berdasarkan opini “Siapakah Rulling Elite Indonesia” karya Anies Baswedan, Kompas, 31 Oktober 2006.

Pembentukan *ruling elite* Indonesia versi Baswedan (2006) ditentukan atas dasar dua hal, perekrutan anak-anak muda dan tren utama bangsa. Tren utama bangsa ini berubah dari satu masa ke masa berikutnya seiring dengan perjalanan sejarah. Anak-anak muda yang pada masa mudanya terlibat dalam tren utama yang mewarnai bangsa ini kelak akan menjadi aktor-aktor di dalam *ruling elite*. Di sinilah kerangka Path Dependence (*historical institutionalism*) jadi relevan dan powerful.

3. Konsep Elit dalam Islam

Menurut Mulkan (1989: 17), elite dalam Islam dapat disimbolkan dengan adanya ulama, kyai, mubaligh, dan guru ngaji. Pasca Orde Baru, keberadaan ulama tetap menjadi elite penentu dalam kaitannya dengan dunia politik. Hal ini terbukti ketika politik santri memperoleh kemenangan dengan terpilihnya Gus Dur menjadi presiden RI keempat dan Amien Rais menjadi ketua MPR RI. Kedua tokoh ini mewakili organisasi Islam terbesar di negeri ini, NU dan Muhammadiyah. Menurut Latif (2005: 583-584), seiring perkembangan zaman, ketika banyak sarjana Muslim belajar ke universitas-universitas Barat dan mulai diperkenalkannya pelajaran-pelajaran umum dalam institusi-institusi pendidikan agama dan pelajaran-pelajaran agama dalam institusi-institusi pendidikan sekuler, semakin membuat kabur perbedaan antara "ulama" dan "intelektual". Banyak intelektual tampil sebagai figur-figur keagamaan yang terkemuka, sementara banyak ulama yang tampil sebagai juru bicara terkemuka dalam isu-isu sekuler.

Selain itu, lanjut Latif (2005: 584-585), semakin banyaknya perguruan tinggi agama, dimana banyak ulama yang memiliki gelar akademis dan juga diperkenalkannya fakultas-fakultas umum di perguruan tinggi agama, menciptakan kebingungan apakah para lulusan dari institusi-institusi tersebut sebaiknya disebut sebagai ulama ataukah intelektual. Sebuah kode baru dibutuhkan untuk menandai fusi kedua kategori itu. Titik temu dari fusi tersebut bukanlah terletak pada kata "intelektual" atau "ulama", tetapi pada sebuah neologisme yang netral, yaitu "cendekiawan". Istilah "Cendekiawan Muslim" menjadi semakin sering dipakai dalam ruang publik Indonesia sejak tahun 1980-an sampai sekarang (pasca Orde Baru), terutama sebagai suatu penanda bagi perkembangan eksplosif dari intelek-ulama dan ulama-intelek Muslim.

Dari sini dapat diketahui, bahwa elite Islam dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu elite ulama dan elite cendekiawan Muslim. *Pertama*, elite ulama. Ulama memiliki tiga kriteria: (1) memiliki kedalaman makrifatullah, seperti mempunyai ilmu yang dalam, tingkat ketakwaan yang tinggi, banyaknya amal shaleh, dan berakhlak yang terpuji; (2) kedalaman ilmu syariah dalam arti luas meliputi ilmu aqidah, ilmu hukum, dan ilmu akhlak; (3) kedalaman pengetahuan tentang ayat-ayat kauniyah, yakni ilmu pengetahuan

yang didasarkan pada pengetahuan empiris dan esperimental (Abdurrahman, *BRM* Juni 1995: 14-15). *Kedua*, elite cendekiawan muslim. Ada tiga unsur kegiatan yang melekat pada cendekiawan muslim: (1) melakukan analisis terhadap gejala sosial dan pembangunan serta melakukan kritik dengan menulis atau berbicara di seminar-seminar dan diskusi; (2) mengembangkan pemikiran kritis dengan menyusun model-model pengembangan masyarakat; (3) menghasilkan karya-karya profesional di berbagai bidang keilmuan. Faktor lain yang turut mencitrakan kelompok cendekiawan Muslim adalah upaya mereka menerjemahkan dan menampilkan profil dan pemikiran cendekiawan luar negeri. Secara lebih sederhana, cendekiawan Muslim adalah mereka yang pernah mendapatkan pendidikan Barat (Rahardjo, 1996: 25, 26, 66).

Setelah kita mengetahui kelompok elite Islam, langkah selanjutnya adalah metode apa yang digunakan untuk menganalisa elite yang dimaksud dalam penelitian ini. Karena itu, peneliti menggunakan tiga pendekatan dalam menganalisa elite sebagaimana dikemukakan oleh Putnam (2001: 91-94). *Pertama*, analisa posisional, yang menganggap bahwa elite adalah mereka yang menduduki posisi tertinggi dalam struktur organisasi formal. Analisa posisi ini merupakan teknik yang paling mudah dan paling umum untuk mengetahui siapa yang berkuasa. *Kedua*, analisa reputasional, yang menganggap bahwa elite adalah mereka yang tidak berada pada posisi formal dalam organisasi, namun mereka mengetahui mekanisme politik dari dekat. *Ketiga*, analisa keputusan, yang menganggap bahwa elite adalah mereka yang memiliki pengaruh dan berhasil mengajukan inisiatif atau menentang usul-usul keputusan.

Sedangkan elite yang merupakan cakupan dalam penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan posisional dan pendekatan keputusan. Jika penelitian ini hanya menggunakan pendekatan reputasional atau pendekatan posisional, maka cakupan bahasanya terlalu luas. Begitu juga jika jika menggabungkan ketiga pendekatan di atas, maka cakupan bahasanya semakin meluas lagi. Sebagai jalan tengah, peneliti menggabungkan dua pendekatan tersebut di atas agar memudahkan menemukan varian perilaku elite, di samping tidak meluasnya pembahasan penelitian ini. Karena itu, penelitian ini pertama-tama akan mengidentifikasi siapa saja elite yang berada di dalam struktur organisasi. Kemudian disaring lagi, siapa saja elite yang memiliki pengaruh terhadap

kebijakan-kebijakan organisasi. Elite-elite inilah yang akan menjadi cakupan bahasan dalam penelitian ini.

4. Sikap Politik Elite Islam

Mengkaji tentang sikap politik (*political attitudes*) berarti mengkaji tentang pemikiran dan pandangan seseorang yang didasarkan pada pendirian mereka berupa pendapat atau keyakinan (KBBI, 1990: 838). Karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana pemikiran dan pandangan politik elite Muhammadiyah dalam merespon dinamika seputar Islam dan politik.

Dalam mengkategorisasikan sikap politik elite, digunakanlah tesis tarik-menarik antara dua kutub ekstrem, yaitu sikap inklusif dan sikap eksklusif. Sikap inklusif lebih mengedepankan substansi (bahkan lebih dari sekadar substansi) daripada simbol. Sedangkan sikap eksklusif lebih mengedepankan simbol daripada substansi. Dua kutub ekstrem inilah yang selalu mewarnai sikap politik di kalangan elite menengah Muslim di Indonesia. Model bentangan dua kutub ekstrem ini, menurut Nashir (2000: 150-151), juga dikembangkan dalam teori Daniel S. Lev tentang golongan atau kelas menengah dalam konteks Orde Baru yang melahirkan polarisasi politik sebagaimana pendapat Mahasin, bahwa setelah tahun 1996, kelas menengah mulai berkembang pesat dalam iklim ekonomi Orde Baru yang menguntungkan sampai batas tertentu menguntungkan secara politik. Hubungan kelas menengah dengan pemerintah Orde Baru menunjukkan kecenderungan terpecah-belah oleh beragam orientasi terhadap negara, terhadap kekuasaan politik. Jika menguntungkan, akan berdampak menyenangkan. Sebaliknya, jika antagonistik, akan berdampak tidak menyenangkan.

Atas dasar itulah, peneliti mencoba mengkategorisasikan sikap politik elite Islam yang pernah menjadi kajian terdahulu ke dalam tiga model sikap sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Kategorisasi Sikap Politik Elite Islam

<i>Model Inklusif</i>	<i>Model Moderat</i>	<i>Model Eksklusif</i>
-----------------------	----------------------	------------------------

Akomo datif	Transfor matik	Idealistik	Formali stik	Totalis tik
Pragm atis	Kritis	Moderat	-	-
-	Realistik	Substantivi stik	-	-

Sumber: Diolah berdasarkan hasil analisa penelitian ini.

Kategorisasi di atas pada kenyataannya bisa saja mengalami kombinasi antara satu sikap dengan sikap yang lainnya, asalkan relevan dengan penelitian ini. Secara lebih detail, berikut ini akan dijelaskan kriteria masing-masing sikap mulai dari model eksklusif dan dilanjutkan ke model moderat hingga model inklusif dengan merujuk pada sejumlah kajian-kajian terdahulu.

- a. Sikap politik totalistik. Kelompok ini mendasarkan sikapnya pada teks yang bersumber dari wahyu, sehingga tidak ada ruang kosong kenyataan yang majemuk (Anwar, 1995: 175-176).
- b. Sikap politik formalistik. Kelompok ini mendasarkan sikapnya pada ketaatan ajaran Islam. Mereka lebih menekankan pada politisasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam seperti yang dibayangkan. Bentuk-bentuk itu muncul dengan adanya partai Islam, ekspresi simbolis, hingga pada sistem ketatanegaraan Islam (Anwar, 1995: 144-145).
- c. Sikap politik idealistik. Kelompok ini mendasarkan sikapnya pada "Islam cita-cita" yang sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perumusan "Islam cita-cita" sebagai pembeda dengan "Islam sejarah", yakni Islam yang dipahami ke dalam konteks sejarah oleh umat Islam (Anwar, 1995: 178-179).
- d. Sikap politik moderat. Kelompok ini berada di tengah-tengah antara sikap formalistik dan sikap pragmatis, sehingga tidak memiliki kecenderungan pada salah satu di antara keduanya (Nashir, 2000: 150-151).
- e. Sikap politik substantivistik. Kelompok ini lebih menekankan substansi daripada simbol-simbol keagamaan yang sifatnya tekstual. Ajaran-ajaran Islam memiliki makna universal dan harus dikontekstualisasikan dengan realitas sosial (Anwar, 1995: 155-156).

- f. Sikap politik transformatik. Kelompok ini mendasarkan sikapnya pada misi kemanusiaan. Ajaran-ajaran Islam harus dikebumikan agar menjadi kekuatan yang mampu membebaskan manusia dari ketidakadilan, kebodohan, dan keterbelakangan. Proses islamisasi direfleksikan dalam karya-karya produktif yang berorientasi pada perubahan sosial (Anwar, 1995: 162).
- g. Sikap politik kritis. Kelompok ini mendasarkan sikapnya pada penyelesaian persoalan dengan melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural membantu untuk menganalisa dan mengidentifikasi ketidakadilan serta kesalahpahaman dalam memahami realitas, misalnya aksi terorisme (Fakih, 2001: 35).
- h. Sikap politik realistik. Kelompok ini lebih menekankan pada keterkaitan antara dimensi substantif dengan konteks realitas sosial yang ada. Islam perlu dihadirkan secara realistik dalam keragaman yang diwarnai oleh perjalanan sejarah (Anwar, 1995: 182-183).
- i. Sikap politik akomodatif. Kelompok ini lebih menunjukkan hubungan baik serta mengembangkan kerjasama, tetapi tetap bersikap kritis atas penyimpangan tanpa mengintegrasikan diri ke dalam lingkaran kekuasaan. Sikap ini cenderung lentur dalam menghadapi perkembangan politik (Jurdi, 2010: 40).
- j. Sikap politik pragmatis. Kelompok ini memiliki pandangan, agar umat Muslim menempuh langkah-langkah praktis, harus meninggalkan pandangan-pandangan yang idealistik. Sikap ini juga menghendaki ditinggalkannya pola politik yang diwarnai konflik pribadi dan konflik golongan (Nashir, 2000: 42).

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Sikap politik tidak hanya bersifat tunggal (Jurdi, 2010: 35). Karena itu, sikap politik bisa gabungan, tidak hanya terdiri satu sikap saja. Kemudian, munculnya sikap politik yang beragam tersebut tidak bisa dilepaskan oleh faktor-faktor yang beragam. Berpijak pada analisa Surbakti (1992: 132-133) dan Budiarto (2007: 49), penelitian ini memfokuskan pada dua faktor yang mempengaruhi sikap politik elite.

Pertama, kategori latar belakang sosiologis. Secara sosiologis, latar belakang seseorang dapat diidentifikasi, antara lain berupa jenis kelamin, umur, pendidikan, asal daerah, suku bangsa, paham keagamaan, pekerjaan, pergaulan, pengalaman organisasi, orientasi hidup individu, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, latar belakang sosiologis difokuskan pada empat faktor yang akan menjadi kecenderungan utama dalam mempengaruhi sikap-sikap politik mereka, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, relasi atau pergaulan, dan orientasi politik individu.

Kedua, kategori organisatoris. Secara terperinci, kategori organisatoris terbagi menjadi tiga faktor: (1) faktor budaya politik organisasi, yaitu pandangan dan sistem nilai yang terkait erat dengan setiap keputusan politis dan sudah berlaku di dalam sebuah organisasi (Nashir, 2000: 53-54); (2) faktor kepentingan politik organisasi, yaitu tujuan dan target yang dikejar oleh sebuah organisasi dari hasil proses politik (Budiarjo, 2007: 49; Firmanzah, 2008: 52); (3) faktor kebijakan organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki keputusan resmi dalam menyikapi segala hal yang berimplikasi pada kehidupan manusia secara umum dan organisasinya secara khusus. Setiap keputusan yang dibuat tentu sudah mengalami proses pemufakatan di internal elite organisasi yang harus ditaati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada berbagai teknik termasuk di dalamnya proses observasi dan wawancara intensif guna memahami pengalaman-pengalaman dari para informan dan kita dapat menemukan sikap tegas mereka (Marsh dan Stoker, 2002: 197). Karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang akan menjelaskan secara komprehensif tentang sikap politik elite Muhammadiyah periode 1998-2010 dalam merespon dinamika Islam dan politik di era reformasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, data primer yaitu kata-kata dan tindakan (Moleong, 2004: 157). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran dan pandangan dari individu-individu elite Muhammadiyah di media massa dan karya-karya mereka yang pernah dipublikasikan. Di samping itu, data hasil wawancara termasuk juga data primer. *Kedua*, data sekunder yaitu dokumen resmi yang disimpan

dalam arsip Muhammadiyah terutama sejak pasca Orde Baru, penelitian-penelitian para ilmuwan terdahulu, buku-buku, media massa, jurnal, makalah, serta berbagai laporan yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. *Pertama*, metode wawancara. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang belum pernah dikaji dan dibahas oleh literatur yang lain (Harrison, 2007: 104), serta digunakan untuk mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan mereka yang pernah dimuat di media massa. Individu yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah informan. Para informan dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) dengan harapan mereka dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. *Kedua*, metode dokumentasi. Dokumen merupakan setiap bahan baik yang tertulis maupun film (Moleong, 2004: 216). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan karya-karya elite Muhammadiyah yang pernah dipublikasikan dalam berbagai bentuk. Selain itu, peneliti akan mengumpulkan karya-karya dari para ilmuwan yang pernah membahas tentang pemikiran dan sikap elite yang dimaksudkan dalam penelitian ini serta arsip, surat keputusan, dan dokumen-dokumen penting yang dianggap memiliki relevansinya dengan penelitian ini.

Semua data yang sudah terkumpul dianalisa secara detail dengan menggunakan tiga tahapan (Sarantakos, 1993: 300-301). *Pertama*, reduksi data. Tahapan ini digunakan untuk memilih dan memilah data yang sudah terkumpul secara cermat dan teliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapan ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian ini berlangsung. *Kedua*, penyajian data. Setelah proses pemilihan dan pemilahan data selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah me-nyajikan data penelitian secara deskriptif dan detail sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan sebelum-nya. *Ketiga*, interpretasi data. Proses terakhir yang tidak bisa dipisahkan adalah analisis interpretatif terhadap uraian yang telah disajikan sesuai dengan metode yang berlaku, lalu diuji validitasnya, sehingga mendapatkan temuan yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari jawaban atas rumusan masalah. Kesimpulan itulah yang disebut sebagai temuan baru.

HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini akan menguraikan tentang siapa saja yang termasuk elite-elite Muhammadiyah sebagai representasi kaum modernis, bagaimana sikap politik mereka dalam merespon dinamika Islam dan politik, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing sikap politik mereka.

1. Siapakah Elite-Elite Muhammadiyah?

Meminjam analisa Putnam (2006: 91-94), elite Muhammadiyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kader Muhammadiyah yang menjabat secara struktural di PP Muhammadiyah sejak periode 1998-2010 yang memiliki pengaruh kuat terhadap setiap kebijakan organisasi. Secara lebih detail, dari proses pengumpulan data, terdapat 32 nama yang termasuk pejabat struktural PP Muhammadiyah. Namun, dari 32 nama tersebut, terdapat nama-nama yang tidak masuk kategori elite Muhammadiyah. Berikut ini alasan-alasannya dijelaskan dalam tabel.

Tabel 3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang Tidak Masuk Kategori Elit

No.	Daftar Nama PP Muhammadiyah	Alasan
1.	Sutrisno Muhdam	Pendeknya masa jabatan (1998-2000), sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara intensif.
2.	Rusydi Hamka	Pendeknya masa jabatan (1998-2000), sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara intensif.
3.	Ramli Thaha	Pendeknya masa jabatan (1998-2000), sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara intensif.
4.	Lukman Harun	Meninggal dunia pada tanggal 8 April 1999, sehingga tidak banyak terlibat dalam percaturan politik pasca Orde Baru.
5.	Bambang Sudibyo	Jabatan yang bersifat administratif (bendahara Periode 2000-2005) dan tidak aktif karena menjadi Mendiknas era kepemimpinan SBY-JK masa jabatan 2004-2009.
6.	Anhar Burhanuddin	Meninggal dunia pada tahun 1999, sehingga tidak banyak terlibat dalam percaturan politik pasca Orde Baru.
7.	Rosyad Sholeh	Sekalipun pernah menjadi wakil ketua PP

		<i>Muhammadiyah, kepemimpinan Rosyad tidak begitu nampak. Aktivasnya justru lebih nampak pada hal-hal yang bersifat administratif, terutama saat menjabat sebagai sekretaris umum (2005-2010).</i>
8.	<i>Rahimi Sutan</i>	<i>Jabatan yang bersifat administratif dan pendeknya masa jabatan (bendahara 1999-2000), sehingga tidak ada waktu lagi untuk urusan-urusan yang bersifat substansial gerakan.</i>
9.	<i>Dasron Hamid</i>	<i>Jabatan yang bersifat administratif (bendahara 2000-2005), sehingga tidak ada waktu lagi untuk urusan-urusan yang bersifat substansial gerakan.</i>
10.	<i>Zamroni</i>	<i>Jabatan yang bersifat administratif (bendahara 2005-2010), sehingga tidak ada waktu lagi untuk urusan-urusan yang bersifat substansial gerakan.</i>
11.	<i>Husni Thoyar</i>	<i>Beberapa bulan setelah muktamar, mengundurkan diri dari PP Muhammadiyah karena terpilih sebagai ketua PWM DKI Jakarta dalam musywil.</i>
12.	<i>Fasich</i>	<i>Tidak aktif karena menjadi rektor ITS Surabaya.</i>

Sumber: Hasil analisa terhadap seberapa jauh keaktifan nama-nama tersebut di PP Muhammadiyah.

Sedangkan mereka yang termasuk elite dalam kategori ini ada 20 nama sebagaimana diseleksi dengan pendekatan analisa posisional dan analisa keputusan. Mereka itu adalah Amien Rais, Syafii Maarif, Din Syamsuddin, Ismail Sunny, Amien Abdullah, Munir Mulkhan, Dawam Rahardjo, Yahya A. Muhaimin, Yunahar Ilyas, Malik Fadjar, Asjmuni Abdurrahman, Watik Pratiknya, Haedar Nashir, Sudibyso Markus, Syukriyanto, AR, Muhammad Muqoddas, Hajriyanto Y. Thohari, Dahlan Rais, Goodwill Zubir, dan Muchlas Abror.

2. Varian Politik Elite Muhammadiyah Sebagai Representasi Kaum Modernis

Fokus penelitian ini adalah sikap politik elite Muhammadiyah dalam merespon dinamika antara Islam dan politik. Isu yang dijadikan sebagai basis analisa ada tiga. *Pertama*, gagasan negara Islam, khususnya tentang keinginan pengembalian Piagam Jakarta dalam amandemen UUD '45 saat Sidang Tahunan MPRI RI 2000-2002. *Kedua*, lahirnya partai-partai Islam setiap menjelang Pemilu. *Ketiga*, fenomena terorisme yang selalu disalahpahami oleh masyarakat umum dan umat Islam pada khususnya.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan proses analisa terhadap pemikiran dan pandangan politik elite-elite Muhammadiyah dalam merespon tiga isu tentang dinamika Islam dan politik, maka penelitian ini mencoba untuk mengklasifikasikan sikap-sikap mereka ke arah mana kecenderungannya sesuai dengan kerangka teoritik yang ditawarkan dalam penelitian ini. Tentu, proses klasifikasi tersebut didukung oleh data-data berupa pemikiran dan sikap-sikap mereka yang tertuang dalam berbagai karya maupun media yang telah dipublikasikan. Atas dasar proses dan tahapan tersebut, ditemukan empat kecenderungan sikap politik elite Muhammadiyah yang berkembang dalam penelitian ini. Keempat sikap itu adalah transformatik-idealistik, moderat-idealistik, realistik-kritis, dan akomodatif-pragmatis. Keempat varian sikap yang berkembang tersebut setidaknya dapat menggambarkan variasi sikap politik di kalangan elite-elite Muhammadiyah di berbagai level struktur.

Pertama, Sikap Transformatik-Idealistik. Sikap transformatik-idealistik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. *Pertama*, berpijak pada misi ideal Islam sebagai agama kemanusiaan. *Kedua*, penekanan bukan hanya sekadar pada pemahaman doktrin Islam, tetapi lebih pada pemecahan masalah-masalah sosial, penyadaran akan hak-hak politik sipil, membebaskan masyarakat dari ketidakadilan, penindasan, dan keterbelakangan. *Ketiga*, nilai-nilai Islam diimplementasikan ke dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (*community empowering*) dengan pengembangan program-programnya ke dalam lembaga-lembaga sosial, semisal LSM dan sejenisnya. *Keempat*, proses islamisasi direfleksikan dalam karya-karya produktif yang berorientasi pada perubahan sosial-ekonomi dan politik menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Mereka yang tergabung dalam kelompok ini secara sosiologis adalah kalangan cendekiawan di lingkungan kampus dan aktivis sosial yang tergabung dalam berbagai LSM.

Gagasan-gagasan mereka dikenal kritis dan berdimensi transformatik. Tak jarang pemikiran mereka menjadi *hot discourses* bahkan kontroversial. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah Syafii Maarif, Dawam Rahardjo, Munir Mul Khan, Amin Abdullah, Haedar Nashir, dan Sudibyo Markus.

Syafii Maarif, kini dikenal sebagai guru bangsa yang selalu menyuarakan isu-isu kemanusiaan, toleransi, dan pluralisme. Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya, terbilang cukup berhasil menjaga jarak dengan penguasa. Di samping itu, gerakan-gerakan atau komunitas intelektual yang bersifat kultural pun muncul ke permukaan, seperti PSAP, Maarif Institute, JIMM, dan Majelis Reboan. Karena dedikasinya yang mulia itulah, Maarif menerima berbagai penghargaan, seperti *Hamengkubuwono IX Award* tahun 2000 untuk kategori multikulturalisme (*detiknews.com*, 29/11/2010), *Magsaysay Award* untuk kategori perdamaian dan pemahaman internasional di Manila Filipina, 31 Juli 2008 (*tokohindonesia.com*, 01/08/2008), penghargaan *Mpu Peradah 2009* oleh Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) sebagai tokoh yang memiliki dedikasi dan kepedulian terhadap pluralisme (*detiknews.com*, 14/06/2009), dan *Habibie Award* untuk bidang harmonisasi kehidupan beragama pada tanggal 30 November 2010.

Dawam Rahardjo, dikenal dengan gagasan “teologi transformatif”-nya. Dia merupakan salah satu cendekiawan Muslim Orde Baru yang telah melahirkan berbagai lembaga sosial seperti LP3ES dan LSAF sebagai arus baru pemikiran Islam yang mengusung ide-ide pembaharuan. Selain itu, Rahardjo juga pernah memimpin dua media berskala nasional, yaitu *Majalah Prisma* dan *Jurnal Ulumul Qur’an* yang sempat menjadi corong utama bagi kalangan intelektual Indonesia.

Munir Mul Khan, merupakan cendekiawan yang memiliki kepiawaian dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya sosiologi, filsafat, pendidikan, dan tasawuf. Dia dikenal juga sebagai penafsir tunggal gagasan-gagasan Kyai Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Pada tataran tertentu, pemikirannya sangat sufistik, sehingga terkadang orang lain mengalami kesulitan dalam mencerna setiap pemikiran dan gagasannya. Tak jarang label “pemikir liberal” melekat padanya. Label “pemikir liberal” juga disandang oleh Amin Abdullah, rekan Mul Khan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik Mul Khan maupun Abdullah, kedua tokoh ini selalu dianggap oleh sebagian kelompok Islam sebagai “orang kafir”. Terlepas

dari itu, pemikiran Abdullah yang cukup fenomenal di kalangan sarjana Muslim adalah gagasan “integrasi dan interkoneksi” untuk disiplin ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu sekuler lainnya. Dengan gagasan ini, Abdullah berharap, tidak ada dikotomi antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Pemikiran.

Haedar Nashir, aktivis Muhammadiyah sejak dididik di IPM. Namanya mulai dikenal oleh warga Muhammadiyah ketika terpilih menjadi pengurus PP Muhammadiyah periode 2000-2005. Nashir termasuk salah satu kader Muhammadiyah yang cukup produktif menulis baik dalam bentuk buku maupun artikel. Hal inilah yang kemudian membawanya menjadi pemred *Suara Muhammadiyah*, majalah resmi milik Muhammadiyah. Nashir pernah mendapat julukan sebagai “Panglima Ideologi Muhammadiyah” di saat Muhammadiyah mengalami konflik ideologis dengan salah satu partai politik bersayap dakwah, yaitu PKS, sejak tahun 2000-an. Berbagai tuduhan negatif dari aktivis-aktivis gerakan tarbiyah ditanggapinya dengan sika-sikap yang cerdas, sebagaimana yang tertuang dalam bukunya *Manifestasi Gerakan Tarbiyah* (2007). Karena itulah, Nashir melakukan riset ilmiah tentang gerakan-gerakan Islam syariat yang kemudian menjadi disertasi doktoralnya di sosiologi agama.

Sudibyo Markus, aktivis NGO/LSM sejak tidak menjabat PNS di Departemen Sosial RI (1973-1998). Berbagai LSM pernah diikutinya, seperti menjadi koordinator program di UNDP Jakarta (1988-1996), direktur PT Indorayon/RGM internasional, direktur *Asia Pacific Resource International Holding*, *Sterring Commite* pada *Humanitarian Forum London*. Kini mendirikan LSM, seperti *Civil Islamic Institute (CCI)* dan *Indonesian Institute for Social Development (IISD)*. Salah satu pendiri IMM ini dikenal pula sebagai kader Muhammadiyah yang memiliki jaringan luas dengan berbagai pihak baik di Eropa, Australia, dan Amerika.

Elite-elite Muhammadiyah yang tergabung dalam kelompok ini ketika merespon isu partai Islam, mereka berpandangan, apapun jenis ideologi partainya mereka harus benar-benar memperjuangkan kepentingan dan hak-hak rakyat, misal mengentaskan kemiskinan dan kebodohan, melawan korupsi, serta memperbaiki sistem pendidikan yang masih belum tertata dengan baik. Karena itu, kelompok ini tidak begitu memperdulikan asas partai, apakah Islam atau sekuler. Visi kelompok ini cukup ideal, yaitu semua partai harus menjadi artikulator kepentingan rakyat.

Dalam merespon isu Piagam Jakarta, kelompok ini menolak secara tegas pemberlakuan kembali Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Alasan mereka adalah, bahwa masyarakat Indonesia itu majemuk dan plural yang membutuhkan sebuah naungan yang lebih netral. Karena itu, konsep negara Islam tidak harus disimbolkan secara formalistik-legalistik. Negara Islam cukup dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari masyarakatnya sehingga terwujud sebuah masyarakat yang ideal, sejahtera, dan demokratis.

Sikap yang sama juga ditunjukkan mereka dalam merespon fenomena terorisme yang selalu dikaitkan dengan jihad. Kelompok ini berpandangan, bahwa terorisme bertentangan dengan nilai-nilai jihad yang berorientasi mulia. Jihad harus dimaknai sebagai perjuangan keras dalam melawan ketidakadilan dalam berbagai bentuk, sehingga terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera. Sedangkan terorisme adalah tindakan kekerasan dan melawan semangat humanisme.

Kedua, Sikap Moderat-Idealistik. Sikap idealistik-moderat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. *Pertama*, orientasi sikap diarahkan menuju Islam cita-cita, yaitu Islam yang sesuai dengan etik dan moral Al-Qur'an dan As-Sunnah yang otentik. *Kedua*, menyetujui adanya kontekstualisasi ajaran Islam tetapi tidak sekadar ditafsirkan asal-asalan, karena untuk menjadi penafsir ajaran-ajaran agama ada syarat-syarat khusus dan tidak sembarang orang. *Ketiga*, tetap menghargai adanya perbedaan sebagai fitrah manusia, namun perbedaan itu dapat disatukan. *Keempat*, ada keinginan untuk mengajak "Islam sejarah" agar bergerak menuju Islam cita-cita. *Kelima*, memahami metodologi dan cara analisis ilmu-ilmu Barat, tetapi tidak semua ilmu-ilmu Barat mereka gunakan, karena kelompok ini tetap meyakini Islam sebagai sistem yang sempurna.

Secara sosiologis, kelompok moderat-idealistik bekerja sebagai birokrat (dosen) di universitas milik pemerintah. Secara keilmuan, mayoritas mereka memiliki konsentrasi ilmu-ilmu *Islamic studies*, seperti Asjmuni Abdurrahman ahli di bidang hukum Islam, Yunahar Ilyas ahli di bidang tafsir, Muhammad Muqoddas di bidang sastra Arab, dan Goodwill Zubir ahli di bidang ilmu dakwah dan ilmu keislaman. Elite yang tergabung dalam kelompok ini sering disebut juga sebagai ulamanya Muhammadiyah. Karena itu, keberadaan elite ini setidaknya menutupi kerinduan warga Muhammadiyah akan sosok seorang kyai atau ulama.

Selain itu, elite yang tergabung dalam kelompok ini adalah mereka yang pernah menjadi pengurus Muhammadiyah di bidang tarjih dan tabligh. Majelis Tarjih merupakan komisi yang memberikan fatwa tentang masalah-masalah hukum Islam. Sedangkan Majelis Tabligh merupakan majelis yang menjadi motor penggerak untuk melahirkan mubaligh-mubaligh Muhammadiyah. Asjuni pernah menjadi ketua dan pembina Majelis Tarjih PP Muhammadiyah selama dua 20 tahun (1985-2005). Selain itu, Abdurrahman pernah juga menjadi ketua MUI DIY dan wakil ketua Komisi Fatwa MUI Pusat.

Yunahar Ilyas memimpin MTDK PP Muhammadiyah sejak 1995 hingga 2005. Barulah tahun 2005 hingga saat ini, menjadi ketua PP Muhammadiyah yang membidangi majelis tarjih. Selain di Muhammadiyah, Ilyas aktif sebagai wakil ketua MUI Pusat. Muhammad Muqoddas pernah menjadi ketua PWM DIY (1995-2000). Setelah itu, Muqoddas menjadi pengurus PP Muhammadiyah yang membidangi majelis tabligh. Goodwill Zubir juga pengurus Muhammadiyah di bagian majelis tabligh sejak di Sumatera Barat (1985-1990). Setelah meninggalkan kampungnya, Zubir bergabung di Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah (1990-2000) hingga menjadi pengurus PP Muhammadiyah sejak 2000 hingga saat ini.

Perlu dicatat juga, bahwa Ilyas, Muqoddas, dan Zubir adalah dewan pembina *Majalah Tabligh*, sebuah majalah bulanan di bawah pembinaan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Tema-tema yang diangkat oleh majalah ini seputar aliran-aliran sesat dalam Islam, menghujat aliran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, melawan Israel-Yahudi, serta tema-tema sejenis. Selain itu, Ilyas dan Muqoddas disinyalir memiliki hubungan yang dekat dengan kelompok-kelompok Islam seperti MMI, HTI, FPI, dan lain sebagainya. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari latar belakang mereka yang pernah studi di Timur Tengah (Saudi Arabia).

Dalam merespon isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini, kelompok ini cenderung bersikap moderat dan tidak berada pada salah satu titik ekstrem tertentu. Karena itu, menurut kelompok ini, partai Islam tetap diperlukan oleh masyarakat Indonesia untuk mewakili suara kepentingan Islam. Pada isu Piagam Jakarta, sejatinya kelompok ini menolak gagasan tersebut. Hanya saja, penolakan mereka tidak begitu keras seperti yang terlihat dalam sikap yang lainnya. Begitu juga dengan isu terorisme, kelompok ini juga menolak

cara-cara brutal yang dilakukan oleh para teroris, namun sikap penolakan mereka tidak setransformatik atau sekritis kelompok lainnya.

Ketiga, Sikap Realistik-Kritis. Sikap realistik-kritis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. *Pertama*, melihat keterkaitan antara dimensi substantif daripada doktrin agama, dengan konteks sosial masyarakat. *Kedua*, Islam yang universal harus dihadirkan secara realistik dalam keragaman dan kemajemukan. *Ketiga*, tidak ingin terjebak pada “politik gincu” yang sebenarnya tidak ada manfaat bagi kebaikan negeri ini. Bagi kelompok ini, falsafah “politik garam” jauh lebih mulia dan justru sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. *Keempat*, sangat mungkin ada proses islamisasi dan akulturasi dengan budaya lokal agar Islam tetap diterima sehingga terjadi keragaman dan manifestasi Islam, walaupun semua didasarkan pada keutuhan ajaran Islam.

Mereka yang tergabung dalam kelompok ini adalah Amien Rais, Malik Fadjar, Yahya A. Muhaimin, Ismail Sunny, Watik Pratiknya, Dahlan Rais, Syukriyanto AR, dan Muchlas Abror. Secara sosiologis, semua elite yang tergabung dalam kelompok ini adalah birokrat yang bekerja di berbagai instansi milik pemerintah, seperti kampus dan Depag. Akibatnya, mereka selalu bersentuhan dengan masyarakat secara langsung dan problematiknya. Bahkan, sebagian dari mereka ada yang pernah menjadi elite legislatif maupun eksekutif, seperti Amien Rais, Malik Fadjar, dan Yahya Muhaimin. Secara keilmuan, mayoritas mereka berangkat dari kelas terdidik, bahkan pernah mengenyam pendidikan Barat.

Berikut ini, penjelasan singkat latar belakang sosiologis mereka yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok elite yang pernah studi ke luar negeri, seperti Amien Rais (dosen UGM, pendiri PAN, dan pernah menjadi ketua MPR RI), Malik Fadjar (dosen UIN Syarif Hidayatullah dan pernah menjadi Menteri Agama dan Mendiknas), Yahya A. Muhaimin (dosen UGM, politisi PAN, dan pernah menjadi Mendiknas), dan Ismail Sunny (dosen UI Jakarta, pernah menjadi duta besar RI di Saudi Arabia dan Oman, serta pernah menjadi Anggota DPR/MPRS tahun 1967-1969 dan Anggota MPR RI Periode 1992-1999).

Kedua, kelompok elite yang studi di dalam negeri, seperti Watik Pratiknya (dosen UGM, kini direktur eksekutif *The Habibie Center*), Dahlan Rais (dosen UNS dan UMS), Syukriyanto AR (dosen UIN Sunan Kalijaga, merupakan putra KH AR. Fachruddin, tokoh

sentral Muhammadiyah di era Orde Baru), dan Muchlas Abror (pensiunan Depag DIY, dosen UAD, dan pernah dikader KH. AR. Fachruddin).

Dalam merespon isu Piagam Jakarta, kelompok ini berpandangan, bahwa realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang multietnis, multiagama, multiras, dan multibahasa tidak tepat menghadirkan Islam dengan jargon-jargon yang simbolik. Jika hal ini dilakukan, maka yang terjadi bukanlah perdamaian, tetapi konflik yang berkepanjangan dan akan berdampak pada persatuan dan kesatuan Indonesia. Karenanya, perjuangan Islam tetap dilakukan, tetapi kita harus melihat realitas masyarakat yang kita hadapi, sehingga untuk konteks saat ini Islam cukup menampilkan nilai-nilai yang substantif yang jauh lebih bermakna ketimbang hal-hal yang bersifat simbolik.

Kelompok ini juga menolak cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh para teroris yang selalu mengatasnamakan agama, karena terorisme bertentangan dengan nilai-nilai universal jihad. Pada isu kepartaian, kelompok ini menjatuhkan pilihan politik pada perjuangan-perjuangan yang non-simbolik, sehingga afiliasi politik mereka tidak ada kecenderungan pada pilihan partai yang berasas Islam. Keyakinan mereka didasarkan pada realitas sejarah politik Islam yang selalu mengalami kegagalan dalam setiap memperjuangkan gagasan-gagasan Islam.

Keempat, Sikap Akomodatif-Pragmatis. Sikap akomodatif-pragmatis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. *Pertama*, meletakkan sikapnya pada posisi kooperatif, bahkan terkadang kompromistis dengan pihak-pihak yang menurut kelompok ini menguntungkan, atau setidaknya berpihak pada apa yang sesuai dengan kehendaknya. *Kedua*, mencari basis legitimasi untuk memperkuat *bargaining position* dengan pihak kompetitor (untuk tidak mengatakan pihak lawan). *Ketiga*, sikap yang tidak konsisten dalam merespon berbagai realitas yang berkembang. Karena itu, segala hal yang bersifat ideologis tidak begitu diperhitungkan oleh kelompok ini. Sikap yang demikian dapat kita lihat pada sosok Din Syamsuddin dan Hajriyanto Y. Tohari.

Din Syamsuddin atau DS lahir dari lingkungan keluarga NU. Semasa mudanya, DS sudah menjadi ketua IPNU Cabang Sumbawa Besar (1970-1972). Namun, semasa mahasiswa, aktivitas organisasinya berganti haluan di IMM. Karir DS terus berlanjut hingga berhasil meraih posisi puncak sebagai ketua umum DPP-Sementara IMM (1985). Sejak saat ini, DS

dekat dengan Lukman Harun, mantan petinggi Parmusi dan politisi Golkar yang selalu berseteru dengan Amien Rais. Nama DS semakin melambung ketika terpilih menjadi ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah (1989-1993). Apalagi saat itu DS baru saja kembali dari studi masternya di UCLA (1988). Banyak orang melihat, DS merupakan tokoh muda Muhammadiyah yang akan menjadi tokoh masa depan. Leonard Binder, Profesornya DS di UCLA, sempat meramalkan, DS akan bersaing dalam arena politik dengan Amien Rais (Tohari, 2001).

Setelah tidak di Pemuda Muhammadiyah, DS (sebutan lain untuk Din Syamsuddin) bergabung di Golkar tahun 1993-1999. Berbagai posisi pernah diraihinya seperti ketua Departemen Litbang DPP Golkar dan wakil sekjen DPP Golkar. Selain itu, DS pernah menjadi wakil ketua Fraksi Karya Pembangunan MPR RI hingga tahun 1999. DS berhenti dari kegiatan politik pada Bulan Januari 1999. Sejalan dengan aktivitasnya di Golkar, DS menjadi dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja (Binapenta Depnaker) RI sejak 1998-2000 (Ramli dan Sucipto, 2010: 288-289). Namun, berhenti pada Bulan Juli 2000. Jabatannya sebagai dirjen dimanfaatkan DS untuk berkeliling Indonesia dalam rangka mempopulerkan dirinya jelang muktamar Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta. Berkat usahanya tersebut, DS meraih suara terbanyak kedua setelah Syafii Maarif. Perolehan suara ini sangat spektakuler, karena DS sebelumnya belum pernah menjadi pengurus PP Muhammadiyah, ketua majelis, ketua lembaga, atau pengurus PWM dan PDM.

Dalam berbagai kesempatan, pernyataan-pernyataan DS selalu melahirkan tafsir yang beragam. Ketika PAN berdiri dan dinyatakan secara tegas tidak ada hubungan organisatoris dengan Muhammadiyah, DS tetap menyatakan, bahwa PAN harus menjadi partai yang mewakili aspirasi politik warga Muhammadiyah. Berikut ini petikan pernyataannya:

“PAN adalah *de facto* sebagai tempat kawan-kawan Muhammadiyah berkumpul. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu mendorong partai itu untuk berperan. Dan, Muhammadiyah bisa memanfaatkannya sebagai medium dakwah lewat jalur politik. Tapi, Muhammadiyah juga harus menjaga hubungan yang sama dengan parpol lain karena, secara faktual, warga Muhammadiyah tersebar di semua partai politik” (*Jawa Pos*, 8/07/2005: 1).

Pernyataan DS diatas mengandung dua makna yang satu sama lain saling bertentangan. Di satu sisi, DS menyatakan Muhammadiyah perlu mendorong PAN karena partai ini tempat berkumpulnya kawan-kawan Muhammadiyah. Di sisi lain, DS menyatakan politik warga Muhammadiyah tersebar di semua partai. Terlepas dari itu, sikap DS secara normatif bertentangan dengan sikap Muhammadiyah yang secara tegas telah menyatakan sikap netral terhadap semua partai, sebagaimana termaktub dalam Khittah Denpasar:

“Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi mungkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban” (Hambali, 2008: 155-156).

Setelah DS terpilih sebagai ketua umum Muhammadiyah yang baru di Malang, pernyataan simpatik pun muncul dari bibir licinnya. DS menyatakan, bahwa Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai manapun, serta menjaga jarak yang sama dengan semua partai. Muhammadiyah tidak menekankan politik kepartaian, tetapi lebih mengedepankan politik dakwah (*Jawa Pos*, 7/07/2005: 2). Bahkan, pernyataan filosofis yang cukup dahsyat pun sempat disampaikan DS saat pidato penutupan muktamar di Malang. DS menyatakan: “Berpikir tentang politik pun tidak, apalagi melakukannya”.

Tak lama setelah itu, ketika PAN dianggap gagal menghantarkan “kader terbaik” Muhammadiyah Amien Rais menjadi presiden RI pada Pilpres 2004 dan banyaknya kader-kader Muhammadiyah yang tidak lolos ke Senayan, kekecewaan muncul dari AMM. Akibatnya, kelompok muda progresif ini mendirikan PAM pada tanggal 9 Maret 2005 sebagai cikal bakal kelahiran PMB. Di tengah proses pembentukan partai tersebut, DS tampil sebagai sosok yang memberikan restu terhadap kelahiran PMB. Lagi-lagi, pernyataan DS tak seirama dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya.

DS menyatakan, pada Pemilu 2004 banyak partai yang mengklaim dekat dengan Muhammadiyah. Tetapi, pada kenyataannya partai yang mengklaim itu sama sekali tidak membela kepentingan Muhammadiyah dan tidak seluruhnya menampilkan nilai-nilai

Muhammadiyah. "Sekarang jangan ada lagi parpol yang mengklaim dekat dengan Muhammadiyah tetapi tidak memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah," tukas DS. Ketika ditanya wartawan, apakah yang dimaksud itu adalah PAN, DS membantahnya (*kompas.com*, 9/07/2008).

Di samping itu, ketika Muhammadiyah secara resmi tidak menyatakan dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres manapun dalam Pilpres 2009, DS justru memfasilitasi pertemuan di antara para calon tersebut kecuali pasangan SBY-Boediono. Pertemuan itu membahas tentang gugatan pelaksanaan Pilpres serta meminta pengunduran jadwal pencoblosan. Sikap yang demikian menunjukkan kesan, bahwa Muhammadiyah terlibat aktif dalam aksi dukung-mendukung terhadap Capres-Cawapres tertentu. Kalau sudah begini, keputusan resmi Muhammadiyah seolah tak ada artinya.

Pada kasus yang lain, ketika MPR RI sedang menggodog amandemen UUD '45 dan Muhammadiyah secara resmi menolak gagasan negara Islam, DS justru tampil sebagai tokoh Islam yang menyatakan dukungannya terhadap pemberlakuan kembali Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Pernyataan-pernyataan DS dapat terlihat dalam Harian *Republika* (19/10/2001) dan *tempointeraktif.com* (5/11/2001) sebagaimana telah dikemukakan di awab bab ini. Padahal, dalam tulisan-tulisan ilmiahnya sebelum menjadi ketua umum Muhammadiyah, DS (*Ulumul Qur'an* No. 2 Vol. IV, 1993: 4-9) menolak pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Menurutnya, "Negara Pancasila" pada hakikatnya adalah "Negara Islam".

Pada akhir tahun 2005, DS pernah mengeluarkan pernyataan atas nama Muhammadiyah tentang dipersilahkannya umat Kristiani untuk memanfaatkan fasilitas AUM dalam rangka untuk Natalan. Berikut pentikan pernyataannya:

"Menjelang Natal dan Tahun Baru kami tidak ingin ada lagi insiden natal berdarah. Dan bagi umat Kristen atau Katolik yang tidak dapat menjalankan ibadah Natal karena tempat ibadahnya masih ditutup, Muhammadiyah menawarkan sarana gedung atau ruang pertemuan milik Muhammadiyah seperti sekolah, kampus, rumah sakit dan sejumlah tempat lainnya untuk dijadikan tempat Natalan." demikian kata DS kepada wartawan disela-sela pertemuan dengan puluhan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Community for Religion

and Peace di gedung PP Muhamadiyah, 21 Desember 2005 (*suarapembaruan.com*, 22/12/2005).

Pernyataan DS di atas dianggap oleh masyarakat sebagai pernyataan resmi Muhammadiyah. Padahal, selama ini Muhammadiyah dikenal sangat anti terhadap gerakan kristenisasi sebagaimana diungkap dalam buku Alwi Shihab yang berjudul *Membendung Arus* (1999). Sejak berdiri, Muhammadiyah tetap konsisten untuk memerangi segala bentuk kristenisasi, seperti yang telah ditegaskan dalam rekomendasi Mukhtar Muhammadiyah ke-41 (7-14 Desember 1985) di Surakarta. Dalam rekomendasi itu dinyatakan:

“Pelaksanaan peringatan Natal di sekolah-sekolah, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, dan lainnya agar mengingat pedoman yang telah disiapkan Pemerintah, yaitu Surat Edaran Menteri Agama yang isinya tidak dibenarkan mengikutsertakan orang-orang pemeluk agama di luar agama Kristen” (M. Djaldan Badawi, 2005: 317).

Di balik sikap-sikapnya yang tidak konsisten dan setiap pernyataannya yang selalu bersayap, DS dikenal sebagai sosok yang menggembar-gemborkan isu-isu seputar perdamaian dan dialog antar peradaban. Berbagai organisasi berskala nasional maupun internasional yang konsen dengan isu-isu perdamaian juga diikuti oleh DS (Ramly dan Sucipto, 2010: 289).²

Fakta-fakta di atas telah memperlihatkan sikap akomodatif DS terhadap berbagai pihak dengan membungkus isu “Islam formal” dan isu-isu kemanusiaan untuk orientasi politik pragmatismenya. DS seolah ingin menampilkan dirinya sebagai tokoh yang rekonsiliatif dalam membangun perdamaian. Pernyataan-pernyataan akomodatifnya terlihat dalam wawancara *Republika* dengan DS. Ketika ditanya, bagaimana hubungan Muhammadiyah dengan pihak eksternal? DS menjawab:

² Beberapa organisasi yang diikuti oleh DS, yaitu ketua *Indonesia Committee on Religions for Peace* (IComRP) sejak 2000-sekarang, *Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations* (CDCC) sejak 2007-sekarang, *Chairman World Peace Forum* (WPC), *President Asian Committee on Religions for Peace* (ACRP) yang bermarkas di Tokyo sejak 2004-sekarang, dan *Honorary President World Conference on Religions for Peace* (WCRP) yang bermarkas di New York sejak 2006-sekarang.

“Kita proporsional saja. Baik itu terhadap partai politik, pemerintah maupun dunia internasional. Pada partai politik, kita tetap tegas, bahwa tidak ada hubungan emosional apapun terhadap partai manapun. Muhammadiyah mengambil sikap netral. Kalau saya pribadi netral aktif, bukan netral pasif” (*Republika*, 10/07/2005).

Ketika ditanya lagi, kenapa kalau pasif? DS kembali menjawab:

“Jika netral pasif, warga Muhammadiyah akan menjadi sasaran pangsa pasar dari partai-partai politik dengan segala eksesnya. Tapi, kalau netral aktif, mencoba melihat bahwa partai-partai politik itu merupakan sarana dakwah yang bisa dimanfaatkan. Untuk itu, perlu menjaga hubungan dan kedekatan yang sama. Jadi, bukan sekadar jaga jarak saja, tetapi juga menjaga kedekatan yang sama. Misalnya, membuka jalan bagi warga sendiri untuk berpolitik” (*Republika*, 10/07/2005).

Efendi (Tesis, 2010: 51) mengatakan, bahwa DS dalam memimpin cenderung menampilkan langgam kepemimpinan yang akomodatif-rekonsiliatif. Hal ini dibuktikan dengan usaha-usahanya yang selalu meredam ketegangan agama serta mencari corak gerakan perjuangan yang konstruktif dan saling mendamaikan. Paling tidak, buah dari ikhtiar itu sudah terlihat dalam bingkai hubungan antara Muhammadiyah dan NU yang cenderung lebih kondusif sebagai dua ormas terbesar di Indonesia. Di bahwa kepemimpinan DS, Muhammadiyah turut berperan dalam upaya mengatasi konflik di Thailand Selatan, bahkan Raja Bhumibol sendiri meminta langsung agar Muhammadiyah ikut membantu penyelesaian konflik antara warga Muslim dan pemerintah setempat.

Yudi Latif, ketika diwawancarai oleh *islamlib.com*, menilai, bahwa DS merupakan seorang politisi. Menurut Latif, DS memang cenderung lebih berpikir politis. Padahal, sejauh yang kita simak, yang dikehendaki orang dari pemimpin baru Muhammadiyah adalah sebuah kejujuran. Artinya, bagaimana ia bisa menempatkan kepemimpinan itu betul-betul untuk kemaslahatan warga Muhammadiyah, bukan untuk kepentingannya sendiri atau mengantarkan obsesi-obsesi politiknya. Dari berbagai analisa di atas, peneliti mengambil kesimpulan, bahwa sikap politik DS mengarah pada sikap politik akomodatif-pragmatis.

Selain DS, ada juga Hajriyanto Y. Tohari yang termasuk dalam kelompok ini. Tohari adalah wakil ketua MPR RI (2009-2014). Dia pernah menjadi dosen UNDIP Semarang (1984-1997), namun keluar dan bergabung menjadi politisi Golkar. Berkat ketekunannya di dunia politik praktis, Tohari terpilih menjadi anggota DPR RI sejak 1997 hingga sekarang. Selain DS, mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah (1993-1998) ini turut mendukung kelahiran PMB sebagai artikulator politik dari kalangan AMM. Dalam berbagai pertemuan, Tohari selalu memfasilitasi keinginan dari senior-seniornya semisal Addaruqutni dan Murod. Padahal, dalam berbagai tulisannya, Tohari menolak segala bentuk politik yang dilabelkan dengan Islam, termasuk partai Islam.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Ditemukannya empat variasi sikap politik tersebut tidak muncul begitu saja tanpa suatu sebab. Karena itu, sikap yang variatif itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikategorisasi ke dalam dua bagian, yaitu kategori latar belakang sosiologis elite dan kategori organisatoris.

Pertama, kategori latar belakang sosiologis elite. Ada empat faktor yang termasuk dalam kategori latar belakang sosiologis elite.

- a. Faktor pendidikan. Perbedaan minat kajian antara yang Islamic studies dan ilmu-ilmu sosial kritis melahirkan cara pandang yang berbeda di kalangan elite Muhammadiyah. Elite yang minat pada *Islamic studies* cenderung bersikap moderat-idealistik. Sedangkan elite yang minat pada kajian ilmu-ilmu sosial kritis cenderung bersikap realistik-kritis dan transformatik-idealistik dengan titik tekan yang berbeda di antara keduanya.
- b. Faktor pekerjaan. Sebagian besar elite Muhammadiyah yang dikaji dalam penelitian bekerja sebagai birokrat. Hal ini menyebabkan mereka selalu berinteraksi dengan banyak pihak yang memiliki beragam kepentingan. Dari sinilah, tututan untuk bersikap bijak mempengaruhi cara pandang mereka. Pada akhirnya, keberadaan mereka sebagai birokrat menyebabkan elite-elite Muhammadiyah selalu bersikap realistik dalam melihat sebuah persoalan.

- c. Faktor relasi atau pergaulan. Besarnya gerakan Muhammadiyah menyebabkan elite-elitenya memiliki relasi dan spektrum pergaulan yang luas dengan berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dari proses pergaulan itu, tentu elite selalu berinteraksi dengan berbagai pihak. Bagi elite yang pernah menjadi pejabat publik cenderung bersikap realistis. Bagi elite yang dekat dengan kelompok Islam progresif dan Islam liberal serta dekat dengan elite agama lain, sikap mereka cenderung transformatik. Bagi elite yang dekat dengan kelompok Islam garis keras, sikap mereka cenderung moderat sebagai pilihan sikap aman. Sedangkan bagi elite yang dekat dengan semua pihak, mereka memanfaatkan untuk menggalang kekuatan bersama demi kepentingan pragmatisnya.
- d. Faktor orientasi politik individu. Setiap elite memiliki orientasi politik yang berbeda-beda di balik setiap manuver-manuvernya. Ada elite yang orientasinya di Muhammadiyah benar-benar berjuang dan berdakwah untuk kepentingan umat. Tetapi ada juga elite yang memanfaatkan Muhammadiyah sebagai kendaraan untuk menuju puncak kekuasaan, bahkan ada pula elite yang memanfaatkan Muhammadiyah sebagai lahan untuk mencari nafkah.

Kedua, kategori organisatoris. Ada tiga faktor yang termasuk dalam kategori organisatoris.

- a. Faktor visi gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki visi ideal MIYS. Visi ini dalam berbagai kesempatan selalu dikaji dan dirumuskan. Berkat pemahaman yang luas terhadap visi ini, akhirnya muncul sebuah pemahaman bersama, bahwa berjuang di Muhammadiyah tidak hanya di politik saja, tetapi bisa di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.
- b. Faktor sikap resmi Muhammadiyah. Elite Muhammadiyah adalah elite yang menjadi teladan bagi para pengikutnya. Sebagai sosok teladan yang baik dan harus memberikan contoh pada umatnya, elite harus benar-benar taat pada setiap kebijakan yang sudah diputuskan oleh persyarikatan. Karenanya, tidak semua elite Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis. Menurut mereka, berdakwah untuk umat tidak kalah terhormatnya daripada di politik, bahkan jauh lebih mulia.

- c. Faktor kontinuitas sejarah. Sejarah akan selalu terus berulang. Begitu juga dengan sejarah Muhammadiyah dan peran para elite-elitenya dalam perjuangan bangsa. Bagi sebagian elite, keterlibatan para tokoh Muhammadiyah terdahulu dalam partai politik menyebabkan mereka terlibat juga dalam partai politik. Menurut kelompok ini, perjuangan yang riil untuk mewujudkan MIYS ada di partai dan parlemen. Sedangkan bagi sebagian elite yang lain, untuk mewujudkan MIYS tidak harus di partai. Semua jalur bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera.

KESIMPULAN

Politik kaum modernis di era reformasi yang direpresentasikan oleh elit-elit Muhammadiyah tidaklah bersifat tunggal melainkan variatif. Varian sikap politik tersebut dapat tergambarkan dalam tabel yang disajikan di bawah ini.

Tabel 4. Varian Sikap Politik Elite Muhammadiyah

Sikap Politik	Nama Elit	Karakteristik Sikapnya
Transforma- tik- Idealistik	Syafii Maarif, Dawam Rahardjo, Munir Mul Khan, Amin Abdullah, Haedar Nashir, Sudibyo Markus	<ul style="list-style-type: none"> • Segala bentuk perjuangan politik Islam, semuanya harus didasarkan pada penyelesaian problem sosial, seperti mengentaskan kemiskinan, melawan korupsi, dan memperbaiki sistem pendidikan. • Pemikiran dan aksi-aksinya lebih senang diwujudkan ke dalam lembaga sosial (LSM) dengan program-program pemberdayaan masyarakat atau <i>community empowering</i> serta menuangkannya ke dalam tulisan-tulisan yang produktif. • Elite yang tergabung dalam kelompok ini dekat dengan kalangan pemikir dan aktivis Islam progresif dan Islam liberal. Tak jarang mayoritas elite dalam kelompok ini mendapatkan stempel sebagai “pemikir liberal”.
Moderat- Idealistik	Asjmun Abdurrahman, Yunahar Ilyas, Muhammad Muqoddas, Goodwill Zubir	<ul style="list-style-type: none"> • Politik Islam tetap diperlukan, tetapi harus sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. • Tidak berpihak pada salah satu titik ekstrem sikap baik eksklusif maupun inklusif. • Kelompok ini tetap menolak cara-cara yang serba simbolik, kekerasan, maupun teror. • Kelompok ini dikenal juga sebagai seorang mubaligh, namun disinyalir dekat dengan aktivis-aktivis Islam semisal HTI, MMI, FPI, PKS, dll.
Realistik- Kritis	Amien Rais, Malik Fadjar, Yahya A. Muhaimin, Ismail Sunny, Watik Pratiknya, Syukriyanto	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih mengedepan falsafah “politik garam” daripada “politik gincu/lipstik”. • Menolak dengan tegas cara-cara yang bersifat simbolik maupun kekerasan. • Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural tidak memungkinkan hadinya gagasan negara Islam. • Semua elite yang tergabung dalam kelompok ini

Sikap Politik	Nama Elit	Karakteristik Sikapnya
	AR, Dahlan Rais, Muchlas Abror	<i>bekerja sebagai birokrat (PNS) di berbagai institusi pemerintah, bahkan sebagian dari mereka mantan pejabat publik.</i>
Akomodatif -Pragmatis	Din Syamsuddin, Hajriyanto Y. Tohari	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Selalu menunjukkan sikap-sikap akomodatif dan kooperatif dengan semua pihak. Karena itu, kelompok ini tidak pernah berpihak ekstrem dengan siapapun. Jika dilakukan, akan merugikan secara politik.</i> • <i>Mencari momentum atau peluang politik untuk menarik simpati dari kalangan Islam.</i> • <i>Memiliki orientasi kekuasaan.</i> • <i>Elite yang tergabung dalam kelompok ini mantan dan masih menjadi politisi Golkar. Kedua-duanya juga mantan elite Pemuda Muhammadiyah.</i>

Sumber: Hasil analisis.

Terjadinya varian sikap politik tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikategorisasikan ke dalam dua hal. *Pertama*, kategori latar belakang sosiologis elite, meliputi empat faktor yaitu: faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor relasi atau pergaulan, dan faktor orientasi politik individu. *Kedua*, kategori organisatoris, meliputi tiga faktor yaitu: faktor visi gerakan Muhammadiyah, faktor sikap resmi Muhammadiyah, dan faktor kontinuitas sejarah. Masing-masing faktor mempunyai pengaruh kuat dalam menentukan perbedaan sikap di antara elite-elite Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. Alfian (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Gramedia. Jakarta
- Amir, Zainal Abidin (2003). *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*. LP3ES. Jakarta
- Anshari, Endang Saifuddin (1997). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*. Gema Insani Press. Jakarta

- Anwar, M. Syafii (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Paramadina. Jakarta
- Baswedan, Anis. "Siapakah Rulling Elite Indonesia" dalam *Harian Kompas*, 31 Oktober 2006
- Bottomore, TB (2006). *Elite dan Masyarakat*. Terj. Abdul Harris dan Sayid Umar. Akbar Tandjung Institute. Jakarta
- Budiarjo, Miriam (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta
- Djojosoekarto, Agung, dan Utama Sandjaja (Editor) (2008). *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia*. Kemitraan Patnership bekerjasama dengan Strategic Transformation Institute. Jakarta
- Efendi, David (2010). *Politik Elite Muhammadiyah: Studi tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah dalam Pemilihan Umum 2009*. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIPOL UGM
- Fakih, Mansour (2001). *Pendidikan Popular Membangun Pendidikan Kritis*. Insist. Yogyakarta
- Firmanzah (2008). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Hambali, Hamdan (2008). *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah. Yogyakarta
- Harrison, Lisa (2007). *Metodologi Penelitian Politik*.: Kencana Predana Media Group. Jakarta
- Jurdi, Syarifuddin (2010). *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Kartodirjo, Sartono (1981). *Elite dalam Perspektif Sejarah*. LP3ES. Jakarta
- Marsh, David dan Gerry Stoker (2002). *Theory and Methods in Politial Science*. Palgrave Macmilla. Hampshire
- Moleong, Lexy J (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulkhan, Abdul Munir (1989). *Perubahan Pola Perilaku dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*. Rajawali Press. Jakarta
- Nashir, Haedar (2000). *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Tarawang. Yogyakarta
- Noor, Deliar (1987). *Partai Islam dalam Pentas Nasional 1945-1965*. Grafiti. Jakarta
- Putnam, Robert D (2001). "Studi Perbandingan Elit Politik" dalam Mohtar Mas'oeed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. GAMA Press. Yogyakarta
- Rahardjo, M. Dawan (1996). *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa*. Mizan. Bandung
- Ramly, Najamuddin dan Hery Sucipto (2010). *Ensiklopedi Muhammadiyah: Pemikiran dan Kiprah dalam Panggung Sejarah Muhammadiyah*. Best Media Utama. Jakarta
- Sahdan, Gregorius (2004). *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Pondok Edukasi. Yogyakarta
- Sarantakos, Sotirios (1993). *Social Research*. Macmillan Education Australia PTY LTD. Melbourne

Surbakti, Ramlan (1992). *Memahami Ilmu Politik*.: Grasindo. Jakarta

Thaba, Abdul Aziz (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Gema Insani Press. Jakarta

Tim Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah (2010). *Profil Satu Abad Muhammadiyah*. PP Muhammadiyah. Yogyakarta

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta

Tohari, Hajriyanto Y (2001). *Muhammadiyah dari Dahlan Sampai Amien Rais*. Makalah tidak dipublikasikan

2. Arsip, Dokumen, dan Keputusan Resmi Muhammadiyah

Badawi, Muhammad Djaldan (2005). *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Muktamar*. Dokumentasi Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhamamdiyah. Yogyakarta

Panitia Pemilihan. Daftar Calon Sementara Anggota PP Muhammadiyah Periode 1995-2000

_____. Daftar Calon Sementara Anggota PP Muhammadiyah Periode 2000-2005

_____. Daftar Calon Sementara Anggota PP Muhammadiyah Periode 2005-2010

_____. Daftar Calon Tetap Anggota PP Muhammadiyah Periode 2010-2015

PP Muhammadiyah. Laporan PP Muhammadiyah Periode 1995-2000 yang Disampaikan pada Muktamar ke-43 Muhammadiyah di Jakarta

_____. Laporan PP Muhammadiyah Periode 2000-2005 yang Disampaikan pada Muktamar ke-44 Muhammadiyah di Malang

3. Harian, Jurnal, Majalah, dan Website

Harian Jawa Pos. 7 Juli 2005

_____. 8 Juli 2005

Harian Republika. 19 Oktober 2001

_____. 10 Juli 2005

Jurnal Politika. Volume 2 No. 2, 2006

Jurnal Ulumul Qur'an. Nomor 2 Vol. IV, Th. 1993

Majalah Prisma. No. Ekstra, 1984 Th. XIII

www.detiknews.com, 29 November 2010

_____. 14 Juni 2009

www.islamlib.com

www.kompas.com, 9 Juli 2008

www.suarapembaruan.com, 22 Desember 2005

www.tempointeraktif.com, 5 November 2001

www.tokohindonesia.com, 01 Agustus 2008